

1. Pemakalah Forum Ilmiah

Judul	:	Menjaga Integrasi Nasional dari Ancaman Dalam dan Luar Negeri melalui Pendidikan Sejarah
Nama Forum	:	Seminar Nasional dan Kongres Hispisi 2016 “
Penyelenggara	:	Fakultas Ilmu Sosial UNJ
Waktu Pelaksanaan	:	28 Mei 2016
Tempat Pelaksanaan	:	Hotel Balairung Jakarta



**Fakultas
Ilmu Sosial**



**SEMINAR
NASIONAL
KONGRES
HISPISI
2016**

PROSIDING

ISBN 978-602-8768-28-3

PENGUATAN JATI DIRI BANGSA UNTUK MEMPERKOKOH INTEGRASI NASIONAL -



Jakarta, 28 Mei 2016

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES HISPIS
TAHUN 2016**

Penguatan Jatidiri Bangsa untuk Memperkokoh Integrasi Nasional

Tim Penyusun

Dr. Abdul Syukur, M. Hum.

Dr. Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, M.Si.

Dr. Budiaman, M.Si.

Drs. H. Suhadi, M.Si.

Achmad Siswanto, M.Si.

Ahmad Tarmiji Alkhudri, M.Si.

Rudi M. Barnasyah, M.Pd.I

Achmad Irfan

Billah Fouza Arasyas

Editor

Tim Seminar

Desain Sampul

Billah Fouza Arasyas

Setting and Layout

Achmad Irfan

Penerbit

Laboratorium Sosial Politik *Press*

Universitas Negeri Jakarta

Lantai 4, Gedung K Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Tema 3: Peranan Strategis Pendidikan untuk Memperkokoh Integrasi Nasional	170
Pendidikan Harmoni: Model Pembelajaran untuk Membangun Jati Diri dan Sikap Toleran Siswa Sekolah Dasar oleh Dr. H. Asep Mahpudz, M.Si.....	171
Tantangan Implementasi Pancasila Sebagai Landasan Etika Moral Sistem Hukum Nasional Di Tengah Kebutuhan Pembaharuan Hukum Indonesia oleh Dr. Wenly R. J. Lolong, S.H., M.H.	181
Kerentanan Masyarakat Perbatasan Indonesia: Suatu Perspektif Geografis oleh Achmad Amirudin	201
Tema 4: Ekonomi Kreatif dan Rekayasa Sosial untuk Memperkokoh Integrasi Nasional.....	218
Peran Ekonomi Kreatif untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Integrasi Bangsa (Studi Kasus Sida Saba Juhut Kab. Pandeglang Provinsi Banten) oleh Dr. Encep Supriatna, M.Pd.....	219
Menjaga Integrasi Nasional dari Ancaman Dalam dan Luar Negeri melalui Pendidikan Sejarah oleh Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.	232
Peran Buku Teks Pelajaran IPS Sebagai Simpul Perekat Kebangsaan oleh Rizky Kurniawan.....	251
Sinergi Pendidikan Nilai dan Karakter di Lingkungan Pesantren dengan Pendidikan Nilai dan Karakter pada Pendidikan IPS Mts untuk Memperkuat Jati Diri Generasi Penerus Bangsa oleh Dr. Siti Malikhah Towaf.....	262
Sumber Daya Manusia sebagai Modal Dasar Pembangunan untuk Memperkokoh Integrasi Nasional oleh Siti Fadjarajani	295
Peran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Menciptakan Konservasi Sosial oleh Dra. Yulia Djahir	309
Analisis Semiotika Film "Ada Apa dengan Cinta 2" dalam Pendidikan Jati Diri Bangsa oleh Dr. Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, M.Si.	321
Analisis Kewirausahaan Pedagang Muda di Pasar Santa oleh Fitria Afriani ..	332

Menjaga Integrasi Nasional dari Ancaman Dalam dan Luar Negeri melalui Pendidikan Sejarah

Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.

ABSTRAK

Globalisasi dan era ekonomi bebas seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengancam integrasi nasional. Belum lagi otonomi daerah yang menunjukkan lokalitas masing-masing daerah sehingga potensi terjadinya integrasi nasional semakin besar. Padahal inti dari integrasi nasional lebih menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pendidikan sejarah dapat menjadi faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Rasa senasib sepenanggungan ditunjukkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi saksi sejarah bagaimana keinginan untuk bersatu muncul di kalangan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah lain seperti Proklamasi Kemerdekaan, dibuatnya Bendera Merah Putih, diciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia menjadi sebuah kesepakatan nasional menjadi salah satu bukti pentingnya pendidikan sejarah dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Tulisan ini merupakan kajian pustaka mengenai bagaimana pendidikan Sejarah dapat menjaga integrasi nasional dari ancaman dalam dan luar negeri, serta model pembelajaran sejarah yang efektif bagi siswa untuk memahami jati diri sebagai bangsa Indonesia. Diharapkan tulisan ini dapat menunjukkan kepada pembaca, bahwa semboyan "jangan sekali-kali melupakan sejarah" masih relevan dengan kehidupan pada saat ini dan dapat menjaga integrasi bangsa dari ancaman dalam dan luar negeri.

Kata kunci: Integrasi Nasional, Ancaman, Pendidikan Sejarah

Pendahuluan

Integrasi nasional merupakan proses-proses integrasi sosial, budaya, *value* dan wilayah menuju penyatuan menjadi sebuah bangsa yang mengarah pada pembentukan identitas nasional. Tantangan Indonesia sebagai negara kesatuan beragam, berbagai model dan strategi yang diterapkan dalam rangka menjamin integrasi nasional selalu mendapatkan hambatan (Aminuddin, 2010). Isu separatisme di Papua, Aceh dan Maluku, otonomi daerah, globalisasi, rendahnya pemahaman jati diri bangsa mengarah kepada tanda-tanda terjadinya disintegrasi.

Menurut Huntington (2004) dalam Gunawan (2008) Semakin melemahnya kekuatan negara dan munculnya "negara-negara yang gagal" memberikan kontribusi terhadap gambaran sebuah dunia yang anarkis dan melahirkan paradigma baru dalam pemahaman sebuah peradaban Paradigma tersebut menekankan ambruknya otoritas pemerintahan, bangkitnya negara-negara, meningkatnya konflik antarsuku, antar etnis dan antar agama, munculnya mafia kejahatan internasional, meningkatnya jumlah pengungsi hingga mencapai berpuluh-puluh juta, proliferasi nuklir dan senjata-senjata penghancur massa lainnya, menyebarnya terorisme, merajalelanya pembantaian dan pembersihan etnis. Soal kecil bisa menimbulkan kekacauan besar yang meluas. Keresahan demi keresahan, tidak cukup berjalan di situ, bahkan keampuhan pendidikan sejarah pun dipertanyakan kontribusinya terhadap kekokohan integrasi bangsa.

Disintegrasi dapat terjadi karena tingkat multikultural yang tinggi di Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pula, ratusan suku bangsa dan budaya serta agama dan aliran kepercayaan. Jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka potensi konflik bermuatan SARA akan membuat Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Tanda-tanda ancaman disintegrasi menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Tan (2006) adalah munculnya konflik di berbagai daerah karena ketidakadilan secara ekonomi, pendidikan primordial yang diberikan oleh calon kepala daerah pada saat pemilihan langsung, dan pemekaran wilayah.

Padahal selama ini integrasi bangsa Indonesia direkat oleh beberapa faktor seperti faktor kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, peranan TNI yang kuat, kesamaan pengalaman historis dijajah oleh kolonialisme Belanda, dan pembangunan ekonomi yang impresif (Sumantri, tanpa tahun). Ketika keempat faktor perekat itu hilang karena berbagai kondisi maka ancaman disintegrasi muncul. Pembentukan integrasi didukung dengan kesamaan dalam bahasa, sistem budaya, cita-cita politik, pandangan hidup dan orientasi keagamaan (Irianto, 2010), menurutnya integrasi nasional adalah:

"Jalan keluar untuk menghadapi yang hingga saat ini masih terus-menerus melanda Indonesia. Konflik antar-etnik, konflik antar-daerah, konflik antar-agama, konflik

antar-partai politik, konflik antar-pelajar, serta sejumlah konflik kepentingan lain semestinya tidak perlu terjadi kalau masing-masing pelaku konflik menyadari bahwa pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah keniscayaan."

Integrasi nasional akan tetap terwujud jika sikap nasionalisme masyarakat tidak hilang. Pada saat ini nasionalisme seakan-akan tenggelam, terutama di kalangan generasi muda Indonesia yang tidak lain adalah para siswa yang sedang mencari jati diri. Siswa terbawa arus budaya Barat agar dianggap telah maju. Pemikiran Barat yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi sesuatu yang diidamkan. Mereka lebih menyukai hasil kebudayaan bangsa lain dibandingkan kebudayaan bangsa sendiri. Atas fenomena tersebut, yang penting bagi suatu bangsa adalah kesetiaan/komitmen. Fukuyama (2001) menyebutnya kepercayaan (the trust). Kesetiaan dan kepercayaan sebagai unsur perekat eksistensi bangsa yang punya rasa ikatan nasionalisme. Bangsa Indonesia belum dapat menumbuhkan rasa saling percaya di semua tingkat dan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Meskipun nasionalisme bagi bangsa Indonesia, masih sangat dibutuhkan, dan mungkin akan terus diperjuangkan selama perjalanan negara bangsa (nation state) ini ke depan, nyatanya bangsa Indonesia hampir "kehilangan" nasionalisme.

Seperti disebutkan di atas, kesamaan historis dapat menjadi faktor untuk merekatkan integrasi nasional. Pemahaman mengenai kesamaan historis dapat diberikan melalui pembelajaran sejarah di sekolah mulai dari level taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Tujuan pendidikan sejarah di persekolahan adalah memunculkan kesadaran sejarah yang melihat bangsa Indonesia sebagai suatu entitas yang berbeda-beda suku, budaya, agama dan bahasa namun dapat dipersatukan menjadi satu kesatuan. Sejarah menjadi mata pelajaran wajib bagi peserta didik dan memberikan wawasan untuk lebih menghayati serta menghargai negeri dan bangsanya, menumbuhkan rasa hormat dan bangga akan kehebatan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh bangsa Indonesia di masa lampau, serta menunjukkan serangkaian perjuangan Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dari penjajah (Wijaya, Panama, & Erina, 2011).

Kenyataannya, peserta didik justru tidak terlalu menyukai mata pelajaran Sejarah karena identik dengan hapalan sehingga terasa membosankan dan malas untuk mempelajarinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 175 responden (peserta didik, mahasiswa maupun peserta muda) selama periode 2010 menunjukkan 42,3 % responden menyukai Sejarah karena menambah wawasan, menarik dan alasan lainnya sehingga perlu diusahakan penyampaian materi yang lebih kreatif namun tetap berisi. Sementara 57,7% responden tidak menyukai Sejarah karena membosankan dan terlalu banyak hapalan sehingga perlu diusahakan penyampaian yang dapat mempermudah dalam menghafal (Wijaya, Panama, & Erina, 2011). Masih menurut penelitian Wijaya, Panama, & Erina (2011) menyebutkan media yang diminati responden dalam mempelajari Sejarah adalah teks (6,3%), gambar (10,3%), animasi (16,6%), video (29,1%), game (32,6%) dan lainnya (5,1%). Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik menganggap bahwa melalui permainan, materi Sejarah dapat lebih mudah untuk dipahami dan dihapalkan.

Penelitian Gunawan (2008) mengenai hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme menunjukkan terdapat hubungan yang positif dalam pengertian semakin bagus pendidikan sejarah maka terbentuknya sikap nasionalisme juga akan semakin bagus. Pendidikan sejarah yang menyenangkan akan mengubah paradigma mahasiswa tentang sejarah itu sendiri. Model pengajaran yang tepat untuk pendidikan sejarah akan menambah semangat mahasiswa untuk menggali segala potensi bangsa dan negara sehingga muncul kebanggaan terhadap bangsanya sendiri. Belajar sejarah dapat mengkonsepsikan kehidupan sesuai dengan perjalanan waktu yang terjadi dengan menempatkan diri mahasiswa di dalamnya. Menanamkan rasa bangga terhadap pendidikan sejarah bukanlah hal yang mudah, diperlukan berbagai upaya untuk membuat pendidikan sejarah disukai oleh mahasiswa.

Berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka dalam penulisan makalah ini akan membahas tentang integrasi nasional dan ancaman yang dihadapi, serta merumuskan model pembelajaran sejarah yang efektif bagi siswa untuk memahami jati diri sebagai bangsa Indonesia sehingga integrasi nasional dapat tetap terwujud.

Integrasi Nasional

Integrasi nasional pada hakikatnya merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek seperti politik (integrasi politik), ekonomi (integrasi ekonomi yang menimbulkan saling ketergantungan ekonomi antar daerah sehingga dapat bekerja sama secara sinergis), serta aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya mengenai hubungan antara suku, lapisan dan golongan) (Suroyo, 2002).

Pendapat lain dikemukakan oleh Sunyoto Usman (1995) dalam Retnowati (2014) yang menyebutkan bahwa integrasi merupakan sebuah proses pada saat kelompok-kelompok sosial tertentu dalam sebuah masyarakat saling memelihara dan menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan politik, ekonomi dan sosial, sehingga integrasi bukan untuk menghilangkan perbedaan tapi memunculkan kesadaran untuk memelihara dan menjaga keseimbangan untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis di dalam masyarakat.

Masyarakat sebagai konsep sosial menurut Kartasasmita (1997) dalam Retnowati (2014) menggambarkan berkumpulnya manusia atas dasar sukarela tanpa terjadi secara fisik tetapi berupa keterikatan dan keterkaitan batiniah. Dalam konsep masyarakat tersebut, terdapat makna kesatuan antara kebinekaan atau keanekaan (*diversity*) dan kekhasan atau kekhususan (*uniqueness*). Menurut Ginanjar dalam Retnowati (2014) *what is common to all* (apa yang menjadi kesamaan) merupakan pertanyaan mendasar setiap kali terjadi hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain (simbiosis mutualisme). Konsep integrasi tersebut akan membentuk karakter bangsa sebagai sebuah kualitas perilaku

kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, oleh hati, oleh rasa dan karsa serta olah raga seseorang atau sekelompok orang (Cholisin, 2011).

Menurut George McTurnan Kahin dalam Gunawan (2013) karakter bangsa Indonesia lambat laun mulai terbentuk sejak kedatangan VOC pada abad ke-16, perkembangan pergerakan nasional, munculnya kesadaran politik pada masa pendudukan Jepang terbentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1945 (Kahin, 1995). Pidato tanpa teks Soekarno dihadapan Panitia Persiapan Usaha Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 dan dicatat langsung secara stenografi menggambarkan karakter bangsa Indonesia:

“ ..., yakinlah, insjallah, tanamkan dalam kalbu bahwa Indonesia merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil resiko... Jika bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak mentekad-mati-matian untuk mencapai merdeka... Kemerdekaan hanya diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad “Merdeka-merdeka atau mati (Kahin, 1995)”.

Menurut Anderson (1999) dalam Gunawan (2013) kesadaran kebangsaan muncul juga bahwa faktor-faktor objektif seperti pendidikan dan bacaan (buku dan koran) membentuk pula kesadaran kebangsaan di kalangan cedekiawan yang melahirkan pemikiran *Imagined Community* sehingga muncullah kesadaran para pemuda pada saat itu yaitu kesadaran terhadap situasi yang tertindas, terbelakang dan diskriminasi yang melahirkan suatu keinginan untuk bebas, merdeka dan maju. Kesadaran ini didukung juga dengan fakta kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, kemudian Gerakan Turki Merdeka, Revolusi Cina, dan gerakan-gerakan nasional di negara-negara tetangga, seperti India dan Philipina. Peristiwa-peristiwa tersebut memperbesar kesadaran nasional dan menyebabkan bangsa Indonesia memiliki rasa harga dirinya kembali. Artinya, setelah kemenangan Jepang atas Rusia, muncul kesadaran dari kalangan pemuda dan siswa Indonesia bahwa ternyata orang Asiapun mampu mengalahkan orang Eropa. Meskipun dimensi eksternal ini juga berpengaruh, akan tetapi pengaruh internal

inilah yang paling dominan, sebab sangat dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia (Anderson, 1999).

Proses integrasi nasional bangsa Indonesia secara historis dimulai dari imperium Majapahit (Suroyo, 2002). Struktur kemaharajaan yang begitu luas diperkirakan berbentuk mirip kerajaan Mataram Islam, yaitu struktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (*nagaragung*): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya, menerapkan sistem pemungutan pajak langsung untuk biaya hidup keluarga raja. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (*mananegara* dan *pasisiran*) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom atau taklukan yang mengakui hegemoni Majapahit tetapi tetap diberi kebebasan penuh untuk mengatur negeri masing-masing. Konsentris ketiga (*tanah sabrang*) adalah menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan negara-negara sahabat antara lain dengan Champa, Kamboja, dan Ayudhyapura (Thailand).

Walaupun belum tentu kebenarannya cerita kerajaan Majapahit berhasil diangkat oleh Soekarno sebagai pembangkit semangat dan solidaritas kebangsaan. Soekarno berhasil menjadikan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai peneguh nasionalisme yang bersifat integratif (Abdullah, 2001). Cerita mengenai Sriwijaya dan Majapahit ini adalah hasil rekonstruksi sejarawan berdasarkan sumber yang tidak sahih dan amat tidak memadai. Rekonstruksi itu segera dianggap sebagai kebenaran oleh kaum nasionalis Indonesia untuk mendukung mitos yang sedang mereka rangkai, yaitu mitos yang berbunyi bahwa Indonesia (yang ketika itu bernama Hindia Belanda) itu dari dulu sudah satu dan yang mereka lakukan hanya melanjutkan sejarah lama. Tujuan Soekarno adalah melihat bahwa bangsa ini punya sejarah, punya visi yang perlu diperjuangkan bukan hanya karena sudah takdirnya atau nasibnya harus ada.

Integrasi nasional kedua disebut dengan integrasi kolonial atas wilayah Hindia Belanda yang dicapai pada dekade kedua abad XX dengan luas wilayah dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi

wilayah dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial, yang terdiri dari *ambtenaar-ambtenaar* (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Karena ketiadaan massa rakyat yang mendukungnya maka integrasi kononial ini langsung runtuh ketika Belanda menghadapi serbuan Jepang (Suroyo, 2002).

Menurut Ingleson (1983) dan Kartodirjo (1972) dalam Gunawan (2014) proses integrasi nasional dengan memunculkan semangat nasionalisme diawali dengan munculnya gerakan emansipasi wanita tahun 1912 yang dipelopori oleh Kartini, Kongres Pemuda pertama dan berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908, Gerakan Jawa Muda (Jong Java) tahun 1911, Gerakan Pribumi (*Inlandsche Beweging*) tahun 1914, Kongres Kebudayaan tahun 1916, dan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, berdirinya organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda, yaitu *Indische Vereeniging* tahun 1908, kemudian berkembang dan berubah menjadi organisasi identitas nasional yang baru pada tahun 1925 dengan nama baru Perhimpunan Indonesia dan berubah lagi menjadi "Indonesia Merdeka", berdirinya Sarikat Islam (SI) pada tahun 1912 yang dipelopori oleh Tjokroaminoto, dan berdirinya PNI tahun 1927), dan berbagai bentuk organisasi kepemudaan, dan organisasi lainnya yang lebih bersifat kesukuan, seperti Jong Sumatra, Jong Celebes dan lain-lainnya.

Meskipun muncul berbagai gerakan yang lebih bersifat kesukuan, seperti Boedi Oetomo, Jong Java, Jong Sumatra dan Jong Celebes, akan tetapi pada akhirnya dapat dipersatukan oleh berbagai gerakan atau organisasi lainnya yang lebih bersifat integratif karena merangkul berbagai gerakan kesukuan antara lain Gerakan Pribumi, Perhimpunan Indonesia, dan puncaknya saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Perhimpunan Indonesia (PI) dikatakan sebagai suatu bentuk gerakan yang lebih bersifat integratif dan nasionalis karena memiliki berbagai fikiran pokok yang lebih mengarah pada "Ideologi Nasionalis", antara lain: (1) *Kesatuan Nasional*: perlunya mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit dan perbedaan berdasarkan daerah dan perlu dibentuk suatu kesatuan aksi

melawan Belanda untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu; (2) *Solidaritas*: tanpa melihat perbedaan yang ada antara sesama orang Indonesia, maka perlu disadari adanya pertentangan kepentingan yang mendasar antara penjajah dan yang dijajah, dan kaum nasionalis haruslah mempertajam konflik antara orang kulit putih dengan kulit sawo matang; (3) *Non-Kooperatif*: keharusan untuk menyadari bahwa kemerdekaan bukan hadiah sukarela dari Belanda, akan tetapi harus direbut oleh bangsa Indonesia dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dan oleh karena itu tidak perlu mengindahkan dewan perwakilan kolonial seperti *Volksraad*; (4) *Swadaya*: dengan mengandalkan kekuatan sendiri perlu dikembangkan suatu struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi dan hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial. Dari keempat bentuk ideologi nasionalis dari organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) seperti di atas, menjadi suatu bukti nyata bagaimana ideologi itu muncul sebagai suatu bentuk reaksi terhadap kolonialisme Belanda. Bahkan ideologi tersebut dianggap sebagai suatu manifestasi dari kesadaran dan rasa nasionalisme yang tinggi. Fenomena di atas menunjukkan bahwa kesadaran akan ketertinggalan dan kungkungan kolonialisme, serta munculnya gerakan-gerakan yang bersifat nasionalisme, umumnya dipelopori oleh para pemuda, terutama para mahasiswa dan kaum terpelajar lainnya (Gunawan, 2014).

Adanya bahasa persatuan merupakan faktor pendukung terjadinya integrasi nasional. Dalam UUD 1945, dinyatakan dengan jelas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, sekaligus memperteguh ikrar Sumpah Pemuda 1928. Ketika istilah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan lahir, terdapat sebuah realitas fungsi yang melekat pada referensi konsep tersebut, yaitu bahasa Indonesia sebagai wahana pemersatu yang mampu menciptakan semangat persatuan antarelemen kebangsaan di seluruh wilayah nusantara. Artinya, pada masa-masa yang lalu, peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu perbedaan-perbedaan unsur kebangsaan di Indonesia memang sudah teruji ((Jalal, 2001) dalam Gunawan (2014)). Sekarang pun konsep bahasa Indonesia sebagai

bahasa persatuan masih tetap dipertahankan dan selalu menjadi simbol dari kejayaan yang pernah dicapai bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam kapasitas fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat, secara kuantitatif bahasa Indonesia pun masih berada pada posisi sebagai *major language*.

Bagaimana pun sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sudah cukup efektif untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Bahasa Indonesia berhasil membangkitkan imajinasi masyarakat sebagai komunitas yang bersatu di bawah naungan negara Indonesia walaupun berbeda bahasa daerah dan tidak saling mengenal. Namun melalui bahasa Indonesia, semua masyarakat dari berbagai suku dapat berkomunikasi dan bangga menggunakan bahasa Indonesia (Gunawan, 2014).

Puncak terjadinya integrasi nasional ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Berakhirnya Perang Dunia II membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, karena Jepang yang kalah dari sekutu sudah tidak sah memimpin dan sekutu belum datang. Menurut Rahardjo (2001) dalam (Suroyo, 2002) perwujudan formal dari integrasi nasional Indonesia terjadi pada saat disahkannya UUD RI tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dasar negara Pancasila kemudian disempurnakan oleh PPKI dilengkapi dengan lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu juga).

Pendidikan Sejarah

Hasan (1996) dalam Gunawan (2008) mengemukakan bahwa Sejarah merupakan wahana pendidikan yang tertua di Indonesia dibandingkan dengan disiplin lain dalam ilmu-ilmu sosial, baik dalam perkembangan pendidikan di Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Sejarah juga menjadi bahan pendidikan politis untuk keabsahan dan memperkuat legitimasi pemerintah. Secara tradisional tujuan pendidikan selalu dikaitkan atas pandangan "*transmission of culture*".

Perkembangan selanjutnya menurut Hasan (1999) dalam Gunawan (2008) pendidikan sejarah terjadi pergeseran dari perenialisme ke esensialisme bahkan rekonstruksionisme sosial bergabung secara ekletik. Pendidikan sejarah tidak saja menjadi wahana memahami keagungan masa lampau dan pengembangan kemampuan intelektual ataupun *center for excellence*, tetapi juga menjadi wahana dalam upaya memperbaiki kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pendidikan sejarah sebagai bagian dari pendidikan dan bagian dari ilmu sejarah memiliki potensi penting dalam memberikan sumbangan terhadap proses pembangunan bangsa, pendidikan nasional bangsa Indonesia yang sedang mengalami perubahan-perubahan menuju ke arah masyarakat Indonesia modern memerlukan persiapan dan pembinaan generasi muda yang akan menjadi pendukung pada masa depan dan dalam hal ini adalah siswa sebagai bagian dari generasi muda. Dalam bidang ekonomi juga diharapkan kemandirian dalam pentas pergaulan ekonomi internasional. Ini dimasukkan dalam kelompok nasionalis populis yang tidak berarti anti pergaulan ekonomi dunia, anti modal asing, atau anti utang luar negeri Baswir (2006) dalam Gunawan (2008).

Melalui pendidikan dan belajar sejarah bangsa maka masyarakat Indonesia umumnya dan pelajar khususnya dapat mengetahui lebih jelas bagaimana perjuangan panjang Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini. Karakter mandiri, berani karena benar, kejujuran, keinginan untuk maju bukanlah karakter yang baru, hanya karena masyarakat Indonesia kurang mengambil pelajaran dari masa lalu. Namun tentu saja bukan hanya mengetahui tapi bagaimana mengaplikasikan pada masa sekarang sehingga martabat bangsa dapat terus dipertahankan (Gunawan, 2013).

Belajar dari sejarah, proses disintegrasi seperti yang pernah dialami oleh kerajaan Majapahit disebabkan oleh kelemahan di pusat kekuasaan (konflik perebutan harta), serta saling pengaruh antara faktor ekonomi, kemakmuran kota-kota pelabuhan, dan faktor budaya, berkembangnya agama Islam, yang membentuk solidaritas dan integrasi horizontal kerajaan-kerajaan pesisir di daerah melawan kekuasaan Majapahit di pusat (Suroyo, 2002).

Pentingnya pendidikan sejarah diungkapkan oleh Abraham Lincoln sebagai "*one cannot escape history*, orang tak dapat meninggalkan sejarah" dan Soekarno yang menyebutkan dalam (Gunawan, 2013):

"*Never leave history*". inilah sejarah perjuangan, inilah sejarah historymu. Peganglah teguh sejarahmu itu, *never leave your own history*! Peganglah yang telah kita miliki sekarang, yang adalah akumulasi dari pada hasil semua perjuangan kita dimasa lampau. Jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri diatas *vacuum*, engkau akan berdiri diatas kekosongan dan lantas engkau menjadi bingung, dan akan berupa amuk, amuk belaka. Amuk, seperti kera kejepit di dalam gelap.(Ceramah Bung Karno tanggal 17 Agustus 1966....

Pemikiran Bung Karno merupakan pemikiran yang bumi dan dapat diserap di semua kalangan. Pemikirannya lebih bumi ini didukung oleh sosok Bung Karno sebagai seorang polyglot yang menguasai bahasa ibu, beberapa bahasa etnik Nusantara, dan beberapa bahasa Barat untuk pergaulan internasional, dan taktik perjuangannya *Machtsvorming* dan *Machtsaanwending* dengan massa-aksi. Bagaimanapun Bung karno adalah seorang orator ulung, master of choosing words yang membuat para pendengarnya terkesima untuk memahami ide-idenya yang cerdas dan luar biasa (Hidayat 2003, 56). Soekarno pun yang mengimajinasikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Melalui proklamasi maka bangsa Indonesia benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah-air di dalam tangan diri sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Jika masyarakat sejahtera maka menurut sejarah, Indonesia tidak akan mengalami disintegrasi.

Model Pendidikan Sejarah

Pembelajaran sejarah di sekolah merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kebangsaan. Pembelajaran sejarah merupakan bagian dari pendidikan nasional yang berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003).. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut maka dirancang sebuah kurikulum yang meliputi aspek kognitif, keterampilan dan sikap (meliputi spiritual dan sosial) yang disebut dengan kompetensi inti. Kurikulum yang dikembangkan untuk pembelajaran sejarah banyak mengandung inovasi yang mengubah posisi pendidikan sejarah dalam banyak hal. Pendidikan sejarah dalam kurikulum 2013 dirancang sebagai mata pelajaran yang sarat dengan keterampilan dan cara berpikir Sejarah, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, pengembangan inspirasi dan mengkaitkan peristiwa sejarah nasional dengan peristiwa sejarah lokal dalam satu rangkaian Sejarah Indonesia (Lampiran III Permendikbud Nomor 60, 2014).

Pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai perkembangan masyarakat dari masa ke masa diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan dan kearifan untuk menghadapi kehidupan pada masa sekarang. John Seeley dalam Wiriaatmadja (2002) mengungkapkan "*We study history, so that we may be wise before the event*". Komponen penting yang menentukan keberhasilan pembelajaran adalah guru sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Guru Sejarah Indonesia dituntut untuk mengembangkan *historical thinking* untuk ditransformasikan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir historis terkait dengan cara berpikir kritis yang merupakan suatu konsep yang memiliki beberapa atribut (Hasan, 2008). Seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis jika sudah mampu menguasai empat atribut dari berpikir kritis, yaitu analisis, perhatian, kesadaran dan pemberian pertimbangan yang independen.

Menurut Ma'mur (2008) dalam Gunawan (2015) Dalam memahami sejarah peserta didik sebaiknya mengetahui sejarah keluarganya, komunitasnya, bidang yang ditekuni, sejarah bangsa dan dunia. Untuk itu peserta didik dituntut aktif bertanya dan membaca bukan hanya mendengarkan secara pasif fakta-fakta sejarah yang ada. Siswa dituntut untuk terlibat dalam pemecahan masalah sejarah, mendengar dan membaca cerita-serita sejarah, bernarasi, dan berliteratur

secara bermakna. Selain itu juga peserta didik dapat melakukan wawancara dengan pelaku sejarah, menganalisa dokumen, foto, catatan sejarah dan situs kesejarahan.

Gunawan (2015) merujuk kepada Permendikbud No. 81 A menjelaskan bahwa model pembelajaran sejarah dapat berkiblat pada tahapan berpikir sejarah yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Dalam kegiatan pendahuluan guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran sambil sesekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan dikaitkan dengan materi yang dipelajari. Setelah itu guru menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai serta mengantarkan peserta didik pada suatu permasalahan atau tugas yang dilakukan untuk mempelajari suatu materi. Kegiatan pendahuluan ditutup dengan menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas.
2. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan matapelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada peserta didik. Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan

- kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, ker
toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang la
tercantum dalam silabus dan RPP. Pengumpulan data sedapat
relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratoriu
lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum menggu
peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan dengan menerapkan
3. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan pese
dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, m
penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilai
secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhad
dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling
memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesua
hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelaja
pertemuan berikutnya.

Model yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah salah
adalah model studi objek historis. Model ini merupakan model pem
langsung di masyarakat yang bertujuan untuk meneliti tempat ata
bersejarah sehingga mamp mempertajam kemampuan berpikir, anal
kerjasama. Menurut I Gde Widya (1999) dalam Suharso (2014,
pembelajaran sejarah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sisw
dinamis untuk mengamati pengalaman masa lalu dari generasi terdah
menemukan konsep-konsep atau ide-ide besar pada masa lampau
mampu membekali siswa dalam menilai perkembangan masa kini dan wa
akan datang. Soedjatmoko (1976) dalam Suharso (2014, hal. 1) men
pembelajaran sejarah diselenggarakan sebagai suatu pengalaman bersa
pengajar dan yang diajar bukan hanya hapalan fakta. Riset bersama ant
dan siswa menjadi metode utama. Siswa dilibatkan secara langsung dalam
engagement baru sehingga mampu melakukan penemuan jati diri sebag
dari bangsa Indonesia.

Konsep sejarah sebagai ilmu tergantung pada pengalaman manusia dalam bentuk artefak maupun dokumen (Syukur, Gunawan, Supriatna, & Sunjayadi, 2013). Melihat hal tersebut, maka model pembelajaran studi objek historis dapat diterapkan di level sekolah dasar dan menengah karena kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan masa lalunya. Dengan mempelajari sejarah melalui studi objek historis, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung mengunjungi objek-objek sejarah di Indonesia sehingga mampu menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Dampak jangka panjangnya adalah integrasi nasional bangsa Indonesia dapat tetap terjaga.

Penutup

1. Integrasi nasional pada hakikatnya merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Integrasi merupakan sebuah proses pada saat kelompok-kelompok sosial tertentu dalam sebuah masyarakat saling memelihara dan menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan politik, ekonomi dan sosial, sehingga integrasi bukan untuk menghilangkan perbedaan tapi memunculkan kesadaran untuk memelihara dan menjaga keseimbangan untuk mencipatakan hubungan sosial yang harmonis di dalam masyarakat
2. Sejarah merupakan wahana pendidikan yang tertua di Indonesia dibandingkan dengan disiplin lain dalam ilmu-ilmu sosial, baik dalam perkembangan pendidikan di Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Sejarah juga menjadi bahan pendidikan politis untuk keabsahan dan memperkuat legitimasi pemerintah. Secara tradisional tujuan pendidikan selalu dikaitkan atas pandangan "*transmission of culture*". Melalui pendidikan dan belajar sejarah bangsa maka masyarakat Indonesia umumnya dan pelajar khususnya dapat mengetahui lebih jelas bagaimana perjuangan panjang Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini. Karakter mandiri, berani karena benar, kejujuran, keinginan untuk maju bukanlah karakter yang baru, hanya karena masyarakat Indonesia kurang mengambil pelajaran dari

masa lalu. Namun tentu saja bukan hanya mengetahui tapi bagaimana mengaplikasikan pada masa sekarang sehingga martabat bangsa dapat terus dipertahankan

3. Model pembelajaran sejarah dapat berkiblat pada tahapan berpikir sejarah yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Model ini merupakan model pembelajaran langsung di masyarakat yang bertujuan untuk meneliti tempat atau benda bersejarah sehingga mampu mempertajam kemampuan berpikir, analisis dan kerjasama. Dengan mempelajari sejarah melalui studi objek historis, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung mengunjungi objek-objek sejarah di Indonesia sehingga mampu menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Dampak jangka panjangnya adalah integrasi nasional bangsa Indonesia dapat tetap terjaga.

Pustaka Acuan

- Abdullah, T. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Aminuddin, M. F. (2010). *Menjaga Demokrasi: Membangun Institusi Demokratik, Menuju Integrasi Politik*. In *Transformasi Kepemimpinan: Tantangan Kaum Muda dan Visi Indonesia Menuju Negara Maju*. Malang: PB PMII.
- Anderson, B. (1999). *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Insist.
- Cholisin. (2011). *Peran Guru PKn dalam Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: PPKn FKIP UAD.
- Fukuyama, F. (2001). *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Qalam.
- Gunawan, R. (2008). *Hubungan Pendidikan Sejarah dan Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme*. Disertasi. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.

- Gunawan, R. (2013). Pembelajaran Nilai-nilai Pahlawan Kemerdekaan Soekarno dalam Rangka Mengembalikan Karakter Bangsa Indonesia. *E-Journal WIDYA Non-Eksakta*, 1-6.
- Gunawan, R. (2014). Bahasa Indonesia dan Nasionalisme Tidak Pernah Mati: Perspektif Empiris-Historis. *Seminar Internasional Bahasa dan Sastra 2014* (pp. 509-519). Mataram, Nusa Tenggara Barat: Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Gunawan, R. (2015). History of Indonesia Learning in Vocational High School: Developing Historical Thinking Skills of Students. *The 2nd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training in 2015*. Jakarta: Fakultas Teknik UNJ.
- Hasan, S. H. (2008, April 8). Pengembangan Kompetensi Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Sejarah. (pp. 1-13). Bandung: IKAHIMSI.
- Hidayat, B. (2003). Karakter Tak Terlupakan: Soekarno Pemimpi, Penggagas, dan Pelaksana. *Jurnal Historia, jurnal Pendidikan Sejarah No.7 Vol IV*.
- Irianto, A. M. (2010). Integrasi Nasional Penangkal Etnosentris di Indonesia. *Roundtable Discussion: Penguatan Strategi Kebudayaan yang Berbasiskan Nilai-nilai Kemajemukan Untuk Memperkokoh Rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (pp. 1-9). Jakarta: Ditjiansosbud Lemhanas RI.
- Jalal, M. (2001, Januari). Nasionalisme Bahasa Indonesia dan Kompleksitas Persoalan Sosial dan Politik. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV*(Nomor 1), 81-92.
- Kahin, G. M. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Indonesia*. (N. B. Soemanto, Trans.) Solo: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan.
- Lampiran III Permendikbud Nomor 60. (2014). *Pedoman Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Retnowati. (2014). Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial. *Jurnal Analisa*, 189, 200. Retrieved Mei 6, 2016, from <http://oaji.net/articles/2015/21111435210942.pdf>
- Suharso, R. (2014, Februari 12). Melacak Jejak Sejarah dan Kearifan Lokal di Dua Kota. *Seminar "Menggali Kearifan Lokal dengan Sejarah"*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: FKIP UHAMKA dan FIS UNNES.
- Sumantri, G. R. (tanpa tahun). *Disintegrasi Bangsa*. Retrieved from [staff.ui.ac.id](http://staff.ui.ac.id/system/files/users/gumilar.r09/publication/artikel-disintegrasibangsapointers.pdf)
- Suroyo, A. M. (2002, Februari 9). *Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Retrieved from [core.ac.uk](https://core.ac.uk/download/files/379/11701997.pdf)
- Syukur, A., Gunawan, R., Supriatna, N., & Sunjayadi, A. (2013). *Modul Materi Pelajaran Sejarah Peminatan SMA*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
- Tan, S. (2006). Pendidikan Multikulturalisme: Solusi Ancaman Disintegrasi Bangsa. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*, 32-34.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Wijaya, T. A., Panama, A. P., & Erina, Y. (2011). *Analisis dan Perancangan Game "The Proclamator"*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Wiriaatmadja, R. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Utama Press.